

**Rapat Koordinasi Nasional Percepatan
Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah (PPRB Pemda) Tahun
2022**



Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan
Deputi Bidkooor Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan

Tugas Kemenko Polhukam

Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan



Peran Kemenko Polhukam

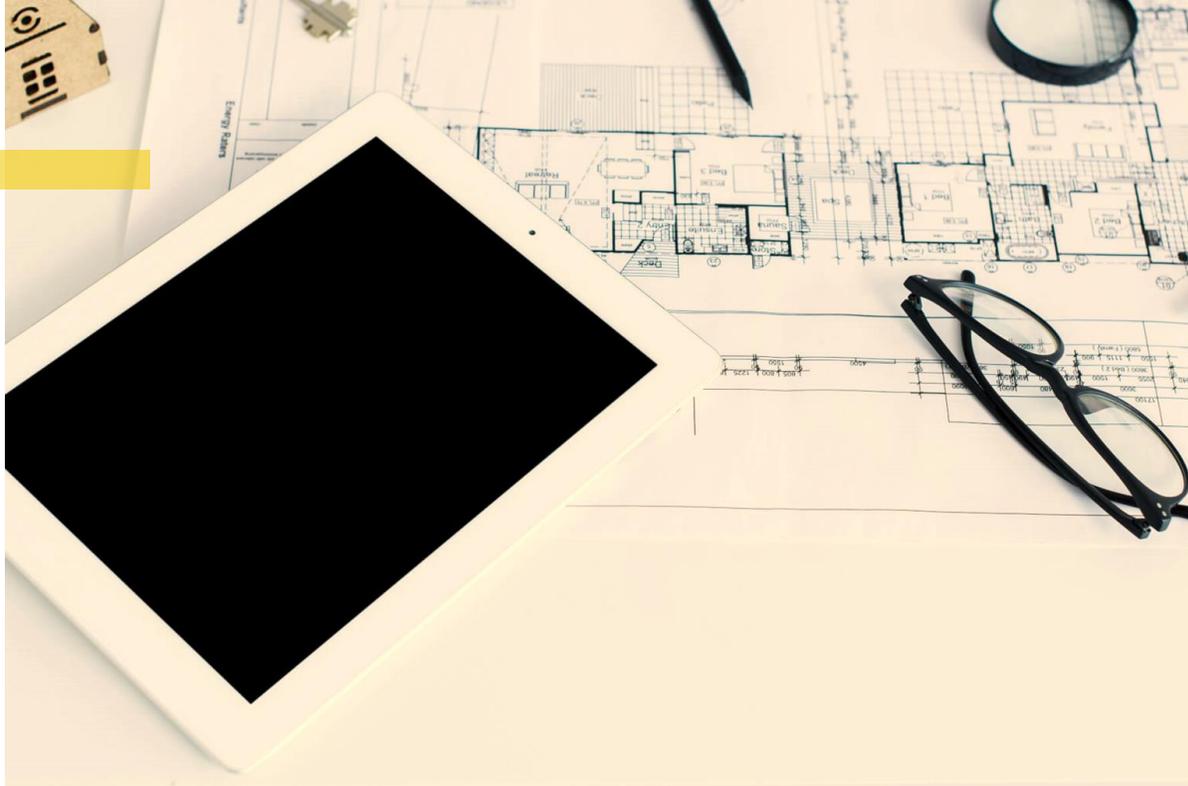
Perpres 73/2000

Pengawasan **Program Nasional** yang telah ditetapkan Presiden dalam Sidang Kabinet

Penyelesaian isu di bidang Polhukam yang **tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar KL** dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud



RB merupakan **Program Nasional** dan sampai saat ini permasalahannya belum dapat diselesaikan atau disepakati secara tuntas



**SINERGITAS PELAKSANAAN RB DALAM
MENDORONG PEMBANGUNAN
NASIONAL**

Evaluasi Pelaksanaan RB

K/L	2019	2020	2021
Predikat B kebawah	3,57 %	3,61 %	2,53 %
Predikat B keatas	96,43 %	96,39 %	97,47 %

Provinsi	2019	2020	2021
Predikat B kebawah	11,76 %	20,59 %	32,35 %
Predikat B keatas	88,24 %	79,41 %	67,65%

Kab/Kota	2019	2020	2021
Predikat B kebawah	73,59 %	75,59 %	68,49 %
Predikat B keatas	26,41 %	24,41 %	31,51 %

Rata-Rata Nilai RB

K/L	2019	2020	2021
	73,85	74,93	75,65

Pemprov	2019	2020	2021
	64,23	64,28	65,63

Kab/Kota	2019	2020	2021
	55,97	53,85	54,44

Permasalahan RB di Daerah

Hasil pemantauan dan inventarisasi data Polhukam

Masih rendahnya komitmen dari Pimpinan Daerah terhadap Implementasi RB



Pemahaman RB hanya sebatas pada Tim RB saja, belum dipahami di masing masing Unit Kerja sehingga belum terimplementasikan secara menyeluruh pada OPD/Pemda

Pemahaman terhadap RB dimaknai hanya sebagai pemenuhan administratif/dokumen kegiatan



Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena Instansi tidak mengkomunikasikan/mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat

Tingginya Indeks RB tidak berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat



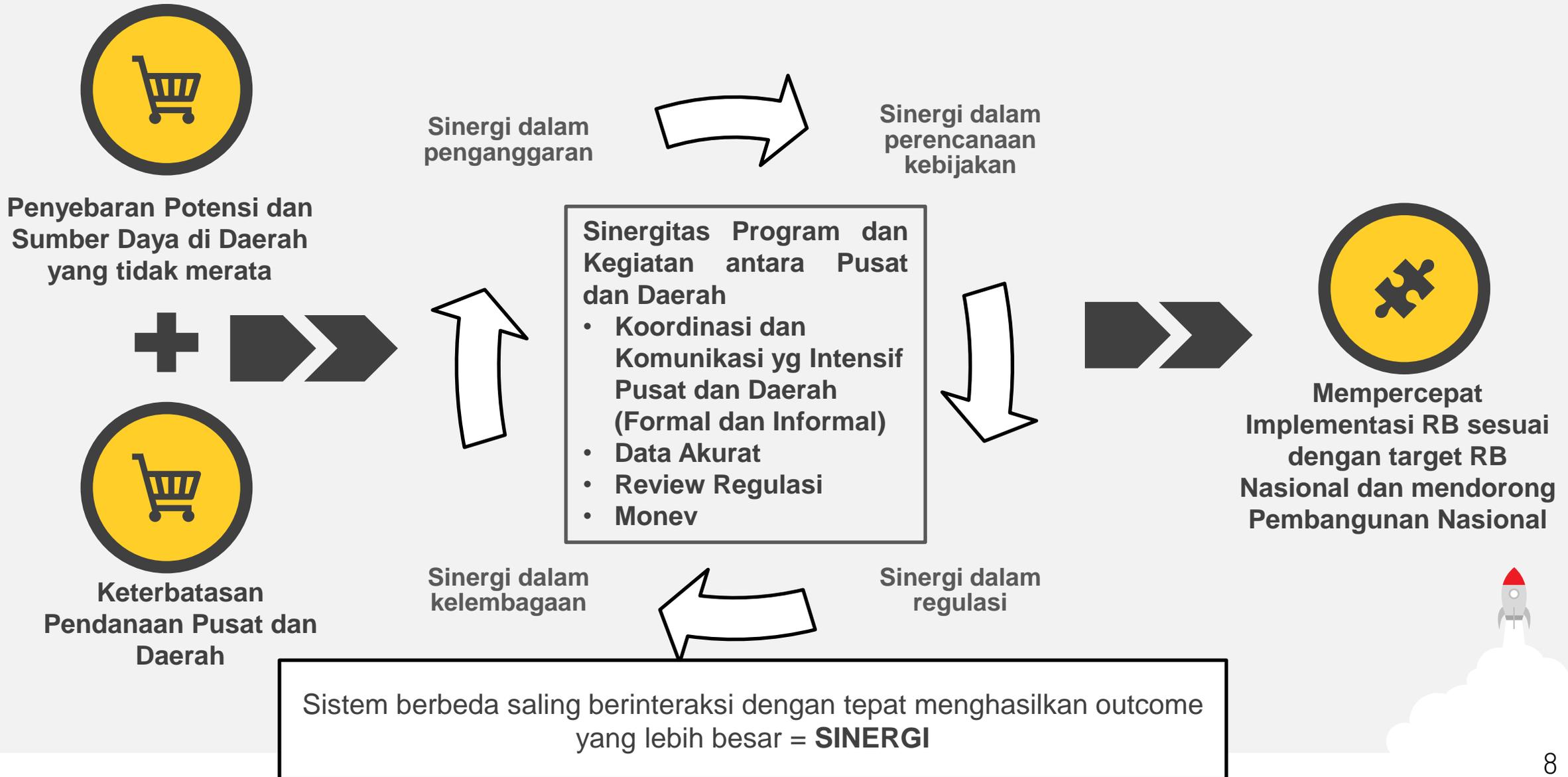
Konsep Sinergi

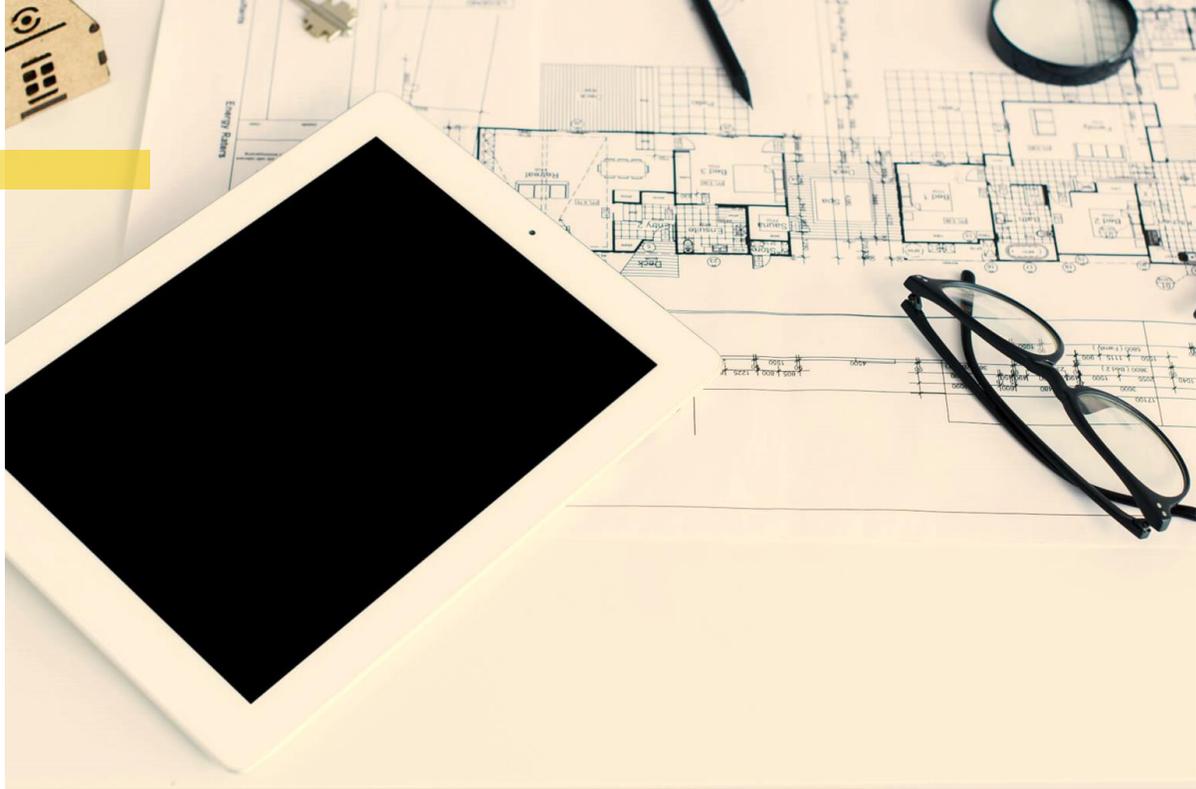
Sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik

Sinergi Membutuhkan:

- ✓ Common Purpose
- ✓ Common Mission
- ✓ Common Meaning

Pentingnya Sinergitas





IKO POLHUKAM

Indeks Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan IKO - POLHUKAM

- Menjadi Alat ukur berbasis kajian dalam menilai kinerja koordinasi Kemenko Polhukam di bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Menggambarkan capaian tuisi koordinasi Kemenko Polhukam di bidang Politik Hukum dan Keamanan secara terukur dan ilmiah
- Bentuk pertanggungjawaban publik secara terbuka atas proses pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan, serta capaian kinerja Kemenko Polhukam kepada masyarakat secara luas
- Menjadi panduan bagi Kemenko Polhukam dalam melakukan strategi dan upaya untuk meningkatkan performance dalam pelaksanaan tugas koordinasi
- Menjadi acuan dalam penyusunan strategi dan tindak lanjut peningkatan kinerja institusional secara internal dan meningkatkan kinerja sinergitas dan efektivitas koordinasi secara eksternal sebagai kondisi yang diperlukan Kmeneko Polhukam

Tujuan Pengukuran IKO-POLHUKAM

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- Dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdsarkan agenda **pembangunan nasional** dan **penugasan Presiden**

Konstruksi IKO-Polhukam

Konstruksi	Dimensi	Sub-Dimensi (Proses Bisnis Kemenko Polhukam)	Indikator Internal		Indikator K/L	
			Faktual (evidence)	Persepsi K/L	Faktual (evidence)	Persepsi Kedeputan
IKO-POLHUKAM	Koordinasi	Identifikasi isu strategis di bidang Polhukam	31 Indikator	20 Indikator	20 Indikator	30 Indikator
		Analisi isu/kasus program/kegiatan				
	Sinkronisasi	Analisis tumpang tindih (konflik) kebijakan/regulasi				
		Perumusan dan penyusunan rekomendasi dan penyesuaian kebijakan				
	Pengendalian	Tindak lanjut internal (Monev oleh Kemenko Polhukam)				
		Tindak lanjut eksternal (Pelaksanaan rekomendasi oleh K/L terkait)				
	Penugasan Presiden	Identifikasi (pemetaan isu penugasan presiden dan K/L terkait)				
		Analisis (penyelesaian program/kebijakan regulasi K/L)				
		Perumusan dan penyusunan rekomendasi (penetapan strategi penanganan isu/masalah berdasarkan perintah presiden)				
		Tindak lanjut (internal Monev, dan Eksternal Implementasi K/L)				

Dimensi, Sub-Dimensi, dan Indikator IKO Polhukam

Eksternal (K/L)

Dimensi	Sub-Dimensi	Indikator	
KOORDINASI	Identifikasi	1	Partisipasi KL terkait dalam identifikasi isu-isu/Kebijakan aktual (nasional/regional/global/penting)
		2	Kesepakatan lintas KL tentang ISU/Kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas
	Analisis	3	Partisipasi KL terkait dalam pendalaman analisis isu-ISU/Kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas
		4	Validasi oleh K/L tentang kejadian/kasus ISU/Kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas
SINKRONISASI	Analisis Tumpang Tindih	5	Partisipasi KL terkait dalam pendalaman analisis Ketidakselarasan isu/kebijakan
		6	Validasi oleh K/L tentang ketidakselarasan isu/kebijakan
	Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi Penyelaran Kebijakan/Regulasi	7	Penetapan angka target (capaian) IKU tahun berjalan
		8	Kesepakatan ketersediaan anggaran di masing-masing KL terkait penanganan isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak
		9	Partisipasi KL terkait dalam menetapkan kegiatan/program penyelesaian isu-isu penting dan mendesak
		10	Partisipasi KL terkait dalam penyusunan penyelaran regulasi

Dimensi, Sub-Dimensi, dan Indikator IKO Polhukam

Eksternal (K/L)

PENGENDALIAN	Implementasi	11	Tercapainya target capaian IKU yang telah ditetapkan
		12	Komitmen KL dalam menyusun rencana aksi sesuai rekomendasi
		13	Realisasi rencana aksi sesuai rekomendasi
		14	Tindak lanjut KL dalam implelementasi hasil penyeselarasan dalam bentuk perubahan kebijakan
		15	Tindakan kontigensi/respon kedaruratan yang dibuat oleh KL terkait
PENUGASAN PRESIDEN	Identifikasi	16	Partisipasi KL terkait dalam identifikasi isu-isu mendesak (urgen) yang menjadi perintah presiden
		17	Validasi data isu polhukam yang menjadi perintah presiden
	Analisis Tumpang Tindih	18	Kesepakatan ketersediaan anggaran di masing-masing KL terkait penanganan isu-isu mendesak (urgen) yang menjadi perintah presiden (nasional/regional/global/urgen)
	Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi Penyeselarasan Kebijakan/Regulasi	19	Partisipasi KL terkait dalam perumusan strategi penanganan isu-isu mendesak (urgen) yang menjadi perintah presiden (nasional/regional/global/urgen)
	Implementasi	20	Tindak lanjut KL terkait dalam menyusun rencana aksi penanganan isu-isu mendesak (urgen) yang menjadi perintah presiden (nasional/regional/global/urgen)

Saran dan Masukan

- Dalam mewujudkan implementasi RB di Pemerintah daerah merupakan tugas kita bersama sehingga perlunya kolaborasi dan sinergi Kementerian/Lembaga yang memiliki kompetensi serta peran dalam penyelesaian RB di Pemda;
- Diperlukan sinkronisasi kebijakan RB dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Diperlukan Kerjasama lintas K/L/D untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi kebijakan RB Nasional;
- Penilaian RB diharapkan berlaku asimetris sesuai karakteristik dan *user* instansi
- Dalam merumuskan instrumen penilaian RB agar dilaksanakan secara komprehensif antara Kemendagri, Kemenpan RB, dan Bappenas serta dilakukan pembasahaan bersama dengan K/L terkait

THANKS

@Kominfotur



@Kominfotur



@Kominfotur

